

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 40-01-12-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **20:46** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh:

Partai Amanat Nasional untuk Provinsi Riau

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi ku kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dkk	uou
Selanjutnya disebut sebagai Pemoho	n;
Terhadap	
Komisi Pemilihan Umum	
Selanjutnya disebut sebagai Termoho r	٦;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:14 WIB**.

Plt. Panitera Muhidin





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 40-01-12-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Partai Amanat Nasional

Kuasa Hukum : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 20:46 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon bertanggal 23 Maret 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy.
2	Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 21 Maret 2024	1 Rangkap	1 Asli
3	Daftar Alat Bukti Pemohon bertanggal 23 Maret 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy. (P-1 s.d. P-34)
4	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Leges, 1 Copy. (P-1 s.d. P-2). Catatan: Ada renvoi di Alat Bukti fisik P-1, Bukti Fisik P-2 tidak sesuai dengan Daftar Alat Bukti.
5	Flashdisk	1 Unit	Berisi soft file Permohonan (word) dan Daftar Alat Bukti (word)

Jakarta, 23 Maret 2024 Plt. Panitera, Muhidin

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id